

Guru Besar Unpad Minta Masyarakat Tak Terprovokasi Isu Separatisme Papua di Tahun 2022

written by Harakatuna



Harakatuna.com. Bandung - Separatis Papua harus mendapat perhatian khusus pemerintah untuk dalam hal keamanan Indonesia di tahun 2022. Pasalnya, pendekatan Teritorial-Sosial yang dicanangkan Panglima TNI dinilai akan dimanfaatkan oleh pihak separatisme untuk kembali menguatkan basisnya di [Papua](#).

Hal tersebut diungkapkan Guru Besar Politik dan Keamanan Unpad, Muradi pada kegiatan Outlook Politik 2022 Indonesian Politics Research and Consulting (IPRC) di Otonomi Kofea, Jl. Merdeka, Kota Bandung, Senin 27 Desember 2021.

“Papua ini menarik, isunya akan terus ada dari November, Desember, bahkan Maret 2022, karena Panglima ada pendekatan baru, hal itu direspon OPM akan semakin menguat, ini jadi sebuah titik balik, separatisme Papua akan menguat lagi, mereka terinspirasi bugenvil island, isu Sapatisme Papua akan cenderung menguat,” kata Muradi.

Muradi mengungkapkan, Pemerintah Indonesia harus mampu menjamin

terciptanya sebuah program dan pendekatan yang berkelanjutan untuk menekan konflik di Papua.

Menurutnya, pembangunan berbasis infrastruktur merupakan hal pokok namun juga harus dibarengi dengan [pendekatan sosial](#) yang berkelanjutan.

“Publik papua belum mengapresiasi, padahal kurang apa Pak Jokowi, dari Sorong-Jayapura jalan sudah nyambung,” katanya.

Problemnya bukan cuma itu, OPM itu basisnya di kepala suku, fam dengan fam itu nyambung, pendekatan yang dilakukan juga harus berbeda, antara mereka yang di gunung dan di tempat bukan gunung berbeda.

“Sebenarnya TNI-Polri sudah mulai melakukan itu, problemnya adalah itu dilakukan tidak conteni, sehingga perlu pelan-pelan, jadi penanganan dan pelayanan harus sampai tingkat bawah,” tambahnya.

Di sisi Politik, lanjut Muradi, ketegasan koalisi partai politik akan semakin tampak di pertengahan tahun 2022.

Pasalnya, tahapan-tahapan untuk Pemilu 2023 akan dimulai awal tahun 2023.

“Juli atau Agustus 2022 akan terjadi pengelompokan, di pertengahan 2022 semua partai akan menegaskan posisinya, karena awal 2023 akan dimulai proses tahapan Pemilu,” tegasnya.

Selain Dua Isu tersebut, ada 5 isu kemanan dan politik yang diprediksi akan menyeruak di tahun 2022.

Isu itu meliputi legislasi politik, pelembagaan politik, korupsi politik, radikalisme dan terorisme, serta pengemaman perbatasan dan SDM.

“Isu Separatisme Papua menjadi paling serius hingga ke isu lainnya, kalau koalisi akan bersifat long term, isu isu ini perlu disikapi serius oleh pemerintah,” ujarnya.